

BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR 180.18/197/2022
TENTANG
PENETAPAN RENCANA PENYUSUNAN
PERATURAN BUPATI BLORA TAHUN 2022
BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pembentukan Peraturan Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan sistematis serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu disusun rencana penyusunan produk hukum daerah dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembentukan rancangan Peraturan Bupati Blora, maka Keputusan Bupati Blora Nomor: 180.18/609/2021 tentang Penetapan Rencana Penyusunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Blora Nomor: 180.18/174/2022 tentang Penetapan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Blora Tahun 2022 terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu disesuaikan dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Penyusunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Blora 45 Tahun 2019 Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :




- KESATU** : Menetapkan Rencana Penyusunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Bupati Blora Nomor: 180.18/609/2021 tentang Penetapan Rencana Penyusunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2022; dan
 - b. Keputusan Bupati Blora Nomor: 180.18/174/2022 tentang Penetapan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Blora Tahun 2022 terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 4 - 4 - 2022

BUPATI BLORA,



ARIEF ROHMAN

JABATAN	PARAF	TGL.
Kepala Daerah		
Kab. Blora		19/04/2022
Kel. Log		19/4/22

TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
3. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora
selaku penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
 NOMOR : 100-18 / 197 / 2022
 TANGGAL : 4 - 4 - 2022

DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BLORA
 TAHUN 2022

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA	KET.
1.	Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
2.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Blora	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
3.	Perubahan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Kabupaten Blora	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
4.	Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
5.	Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
6.	Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
7.	Pedoman Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
8.	Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
9.	Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
10.	Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
11.	Pengaturan Jam Kerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
12.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BLORA	
13.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BLORA	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA	KET.
14.	Kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	BAGIAN KESRA SETDA KAB. BLORA	
15.	Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Blora	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KAB. BLORA	
16.	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KAB. BLORA	
17.	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Energi	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KAB. BLORA	
18.	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patragas Hulu	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KAB. BLORA	
19.	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Blora Wira Usaha	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KAB. BLORA	
20.	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amerta Kabupaten Blora	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KAB. BLORA	
21.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati Blora	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BLORA	
22.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026	BAPPEDA KAB. BLORA	
23.	Sistem Layanan Rujukan Terpadu	BAPPEDA KAB. BLORA	
24.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora	BAPPEDA KAB. BLORA	
25.	Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	BAPPEDA KAB. BLORA	
26.	Pola Hubungan Kerja Tim Percepatan Pembangunan Daerah	BAPPEDA KAB. BLORA	
27.	Tata Cara Penyelenggaraan Tugas Belajar Penerbitan Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik dalam Administrasi Kepegawaian dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	BKD KAB. BLORA	
28.	Peraturan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	BKD KAB. BLORA	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA	KET.
29.	Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara	BKD KAB. BLORA	
30.	Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	BKD KAB. BLORA	
31.	Perlindungan dan Pelayanan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	BKD KAB. BLORA	
32.	Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	BKD KAB. BLORA	
33.	Pola Karier Pegawai Negeri Sipil	BKD KAB. BLORA	
34.	Tata Cara Penebangan dan/atau Penjualan Pohon Milik Pemerintah Kabupaten Blora	BPPKAD KAB. BLORA	
35.	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga	BPPKAD KAB. BLORA	
36.	Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Pemerintah Kabupaten Blora	BPPKAD KAB. BLORA	
37.	Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa	BPPKAD KAB. BLORA	
38.	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPPKAD KAB. BLORA	
39.	Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi	BPPKAD KAB. BLORA	
40.	Tata Cara Pemberian Piutang Daerah	BPPKAD KAB. BLORA	
41.	Tata Cara Pergeseran Anggaran	BPPKAD KAB. BLORA	
42.	Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	BPPKAD KAB. BLORA	
43.	Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2023	BPPKAD KAB. BLORA	
44.	Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan	BPPKAD KAB. BLORA	
45.	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD KAB. BLORA	
46.	Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	BPPKAD KAB. BLORA	
47.	Implementasi Transaksi Nontunai	BPPKAD KAB. BLORA	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA	KET.
48.	Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Keputusan Keberatan, Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah yang Terutang	BPPKAD KAB. BLORA	
49.	Kawasan Tanpa Rokok	DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
50.	Penjualan Produksi Usaha Daerah	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BLORA	
51.	Penyelenggaraan PAUD/HI	DINAS PENDIDIKAN KAB. BLORA	
52.	Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah	DINAS PENDIDIKAN KAB. BLORA	
53.	Pedoman Pengelolaan Aset Desa	DINAS PMD KAB. BLORA	
54.	Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	DINAS PMD KAB. BLORA	
55.	Besaran Penghasilan Tetap Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Blora	DINAS PMD KAB. BLORA	
56.	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa	DINAS PMD KAB. BLORA	
57.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DINAS PMD KAB. BLORA	
58.	Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Blora	DINAS PMD KAB. BLORA	
59.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa di Kabupaten Blora	DINAS PMD KAB. BLORA	
60.	Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora	DINAS PMD KAB. BLORA	
61.	Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Blora	DINAS PMD KAB. BLORA	
62.	Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2023	DINAS PMD KAB. BLORA	
63.	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora	DINAS PMD KAB. BLORA	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA	KET.
64.	Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023	DINAS PMD KAB. BLORA	
65.	Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023	DINAS PMD KAB. BLORA	
66.	Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	DINDALDUK DAN KB KAB. BLORA	
67.	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora Tahun 2022-2046	DINDALDUK KB KAB. BLORA	
68.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	DINPORABUDPAR KAB. BLORA	
69.	Cagar Budaya	DINPORABUDPAR KAB. BLORA	
70.	Komite Seni Budaya Nusantara/Dewan Kebudayaan	DINPORABUDPAR KAB. BLORA	
71.	Desa Budaya	DINPORABUDPAR KAB. BLORA	
72.	Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	DINRUMKIMHUB KAB. BLORA	
73.	Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan	DINRUMKIMHUB KAB. BLORA	
74.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Kab. Blora	DINRUMKIMHUB KAB. BLORA	
75.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kab Blora	DINRUMKIMHUB KAB. BLORA	
76.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kab Blora	DINRUMKIMHUB KAB. BLORA	
77.	Pengelolaan Sampah Dan Pengurangan Penggunaan Plastik	DLH KAB. BLORA	
78.	Pengelolaan Sampah Spesifik	DLH KAB. BLORA	
79.	Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	DLH KAB. BLORA	
80.	Kompensasi Resiko Petugas Kebersihan Dan Pengelola Sampah	DLH KAB. BLORA	
81.	Penyelenggaraan Perpustakaan	DPK KAB. BLORA	
82.	Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	DPK KAB. BLORA	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA	KET.
83.	Perpustakaan Desa	DPK KAB. BLORA	
84.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Blora	DPMPTSP KAB. BLORA	
85.	Rencana Detail Tata Ruang Kec. Blora Kab. Blora Tahun 2022-2042	DPUPR KAB. BLORA	
86.	Rencana Detail Tata Ruang Kec. Cepu Kab. Blora Tahun 2022-2042	DPUPR KAB. BLORA	
87.	Pedoman Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA	
88.	Pedoman Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA	
89.	Pedoman Pengelolaan Resiko	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA	
90.	Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Kabupaten Blora	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA	
91.	Pedoman Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA	
92.	Pedoman Tata Cara Penanganan Pengaduan	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA	
93.	Pedoman Pengendalian Gratifikasi	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA	
94.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA	
95.	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Blora	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA	
96.	Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA	
97.	Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
98.	Pembinaan dan Pengawasan BLUD	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
99.	Pola Tata Kelola	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
100.	Rencana Strategis	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA	KET.
101.	Standar Pelayanan Minimal	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
102.	Penyusunan, Pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
103.	Pelaksanaan Anggaran	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
104.	Pengadaan Barang dan Jasa	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
105.	Tata Cara Penghapusan Piutang	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
106.	Tata Cara Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
107.	Tata Cara Kerja Sama	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
108.	Pengelolaan Investasi	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
109.	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
110.	Kebijakan Akuntansi	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
111.	Penilaian Kinerja BLUD dan Laporan Dewan Pengawas	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
112.	Laporan Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah dan kepegawaian	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
113.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
114.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora	RSUD DR. R. SOETIJONO BLORA /DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA	KET.
115.	Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya	RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
116.	Pembinaan dan Pengawasan BLUD	RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
117.	Pola Tata Kelola	RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
118.	Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD di Kab Blora	RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
119.	Sistem Akuntansi Keuangan BLUD RSUD di Kab Blora	RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
120.	Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD dr R Soetijono Blora	RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
121.	Tarif Layanan pada RSUD Kab Blora yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan	RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	

BUPATI BLORA,



ARIEF ROHMAN

JABATAN	PASANG	TGL.
Sekretaris Daerah	1	
Asisten	1	14/09.2022
pelog	1	14/09/22